

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
PENGUATAN DAN PENGGERAKAN MITRA KERJA DALAM PROGRAM
KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI
TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2026

A. PENDAHULUAN

Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) merupakan salah satu program prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas keluarga Indonesia melalui pengendalian laju pertumbuhan penduduk, peningkatan kesertaan ber-KB, serta penguatan ketahanan keluarga. Keluarga Berencana (KB) di Indonesia dimulai pada tahun 1970an yang bertujuan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk yang cepat. Tujuan utama program ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat melalui perencanaan keluarga yang efektif. Beberapa faktor yang melatar belakangi program KB disamping pengendalian pertumbuhan penduduk, juga mengurangi angka kemiskinan. Selain itu, program ini juga menjadi bagian integral dari strategi percepatan penurunan stunting sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. Salah satu indikator terjadinya balita stunting adalah 4T (terlalu muda, terlalu dekat, terlalu sering, terlalu tua). Sehingga program KB dapat menjadi salah satu alat untuk pencegahan terjadinya balita stunting.

Mitra Kerja sebagai organisasi masyarakat dengan jaringan kader hingga tingkat desa memiliki potensi besar dalam mendukung implementasi program Bangga Kencana. Dengan basis massa yang luas, Mitra Kerja dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan edukasi kesehatan reproduksi, gizi keluarga, dan pentingnya perencanaan keluarga. Kesuksesan program KB tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah tanpa melibatkan mitra kerja yang memiliki kepedulian terhadap program Keluarga Berencana dan Peningkatan Kualitas Keluarga.

Berdasarkan data statistik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 PUS 5.729.918 dan Peserta KB aktif 3.774.753. Unmet need sebesar 10 dan PA MKJP sebesar 32,8. Jumlah pelayanan peserta KB baru pasca persalinan berdasarkan metode kontrasepsi sebesar 229.932 akseptor. Pelaksanaan kegiatan penguatan dan penggerakan Mitra Kerja di Jawa Tengah pada tahun 2026 menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan tenaga kesehatan. Kegiatan ini untuk meningkatkan kapasitas Mitra Kerja dalam memberikan edukasi, advokasi, serta layanan KB di tingkat Kabupaten/Kota.

Kegiatan ini diharapkan mampu menjawab permasalahan tentang angka ketercapaian ber-KB yang dihadapi di Jawa Tengah. Adapun Tema pelayanan KB momentum awal tahun yang terintegrasi Muslimat NU tahun 2026 adalah “PANTAU KB” (Pelayanan Kontrasepsi Untuk Penggarapan Unmet Need KB di Wilayah Prioritas).

B. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
2. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting;
3. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi bagi Pasangan Usia Subur dalam Pelayanan Keluarga Berencana;
4. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pelayanan Keluarga Berencana Pascapersalinan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Keluarga, Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Berencana Dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penduduk Dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 52).

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud:

Petunjuk teknis ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Penguatan Dan Penggerakan Mitra Kerja Dalam Program KBKR Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

2. Tujuan:

- a. Meningkatkan kesertaan KB modern dan menurunkan unmetneed di wilayah prioritas penggarapan program KBKR.
- b. Meningkatkan jangkauan pelayanan KB bagi PUS.
- c. Meningkatkan peran serta mitra kerja dalam mendukung program KBKR.
- d. Memperluas jangkauan edukasi dan advokasi KB di masyarakat melalui jaringan mitra kerja.
- e. Memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting dan peningkatan mCPR di Jawa Tengah.
- f. Meningkatkan cakupan peserta KB baru termasuk KB Pasca Persalinan.
- g. Menghasilkan rekomendasi strategis untuk penguatan program KBKR di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- h. Mengoptimalkan pemanfaatan BOKB Penggerakan Pelayanan KB MKJP Tahun 2026.

D. MEKANISME KEGIATAN

1. Lokasi Pelaksanaan

- a. Kegiatan ini dilaksanakan di 35 kabupaten/kota dengan 17 kabupaten/kota wilayah prioritas, yang meliputi: Kebumen, Purworejo, Boyolali, Klaten, Karanganyar, Sragen, Kudus, Jepara, Semarang, Kendal, Pekalongan, Tegal, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kota Semarang, dan Kota Tegal.
- b. Seluruh fasilitas pelayanan Kesehatan.

2. Jenis Pelayanan

- a. Pelayanan KB yang diberikan adalah Peserta KB Baru meliputi MKJP, Non MKJP dan KBPP.
- b. Pelayanan Kesehatan yang lain (tes IVA, dan lain-lain)

3. Peran Mitra Kerja

- a. Mitra kerja bertugas mencari akseptor KB dari anggota maupun masyarakat untuk berpartisipasi dalam momentum pelayanan KB bersama mitra.
- b. Bagi akseptor KB metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP), khususnya IUD, OPD KB dapat mengajukan klaim bantuan uang harian sebesar Rp50.000,- kepada DP3AKB Provinsi Jawa Tengah, selama kuota masih tersedia.

4. Stimulasi Penyelenggaraan.

Penyelenggaraan kegiatan penguatan dan penggerakan mitra kerja akan mendapatkan bantuan konsumsi berupa makan dan minum untuk 100 orang per lokasi. Pelaksanaan akan dimonitor langsung oleh Tim Provinsi.

5. Sosialisasi, Edukasi, dan Advokasi.

Dilakukan oleh BKKBN, DP3AKB, OPD KB kabupaten/kota, serta mitra kerja kepada seluruh lapisan masyarakat. Bentuk kegiatan dapat berupa:

- Pertemuan langsung (misalnya pengajian atau pertemuan komunitas).
- Sosialisasi tidak langsung melalui media sosial masing-masing pihak.

6. Monitoring Pelayanan KB.

Tim Provinsi yang terdiri dari BKKBN, DP3AKB, dan mitra kerja wilayah provinsi akan melakukan monitoring di 3 lokasi pelayanan (fasyankes) terpilih. Pelaksanaan dilakukan tanpa seremoni, kecuali pada kondisi tertentu seperti kegiatan kick-off atau jika dihadiri pejabat.

7. Pelaporan.

Pelaporan hasil pelayanan KB dilaporkan melalui aplikasi SIGA BKKBN setiap hari dan akan dilakukan feedback setiap harinya.

E. HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil yang ingin dicapai dari pelaksanaan Penguatan dan Penggerakan Mitra Kerja Dalam Program KBKR Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 antara lain:

1. Tersedianya laporan kegiatan penguatan dan penggerakan lokasi prioritas.
2. Meningkatnya jumlah akseptor KB baru termasuk KB Pascapersalinan.
3. Menurunkan angka stunting.
4. Terbentuknya komitmen bersama antara mitra kerja dan pemerintah daerah dalam mendukung KBKR.

5. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga dan kesehatan reproduksi.

F. TIM PELAKSANA

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah
2. Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah
3. Mitra Kerja di Jawa Tengah

G. PENUTUP

Petunjuk Teknis Kegiatan Penguatan dan Penggerakan Mitra Kerja Dalam Program KBKR Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 ini disusun sebagai acuan teknis dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud agar berdaya guna dan berhasil guna serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH



EMA RACHMAWATI